

Catatan Editor
Indonesia Economic and Development Outlook 2026

Davos 2026 dan Dunia yang Kehilangan Kepastian Arah

Muhyiddin Martain^{1*}

¹ Ketua Dewan Editor Bappenas Working Papers

Korespondensi: ^{1*} udyn@bappenas.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.535> | halaman: 1 - 3

Davos selalu datang dengan janji dialog global. Namun Davos 2026 justru memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar dari sekadar forum diskusi elite. Dunia bukan hanya menghadapi krisis kebijakan, melainkan krisis kepastian arah. Banyak pemimpin berbicara dan banyak kesepakatan diumumkan, tetapi semakin terasa bahwa dunia bergerak tanpa peta yang jelas. Bukan karena kurangnya ide, melainkan karena melemahnya fondasi bersama dalam membaca masa depan.

World Economic Forum merangkum suasana tersebut melalui artikel berjudul “*4 takeaways from Davos 2026: New deals, a reckoning, dialogue and more questions than answers*”, sebuah judul yang secara jujur merefleksikan kondisi global saat ini. Forum tersebut mencatat adanya kesepakatan baru, momen perhitungan ulang terhadap arah kebijakan, serta dialog yang berlangsung intens. Namun yang paling menonjol justru pengakuan bahwa pertanyaan yang muncul jauh lebih banyak daripada jawaban yang tersedia. Davos tahun ini dengan demikian lebih menyerupai ruang pengakuan kolektif bahwa sistem global sedang berada dalam fase transisi yang rapuh, di mana kepercayaan belum sepenuhnya hilang, tetapi juga tidak lagi utuh sebagai fondasi bersama.

Kesepakatan tetap menjadi etalase utama. Kerja sama di bidang investasi, energi, teknologi, dan transisi hijau kembali ditawarkan. Namun nadanya berbeda dengan satu dekade lalu. Jika sebelumnya kesepakatan dibingkai sebagai ekspansi peluang dan optimisme globalisasi, kini banyak yang lahir dari logika mitigasi risiko. Dunia tampak lebih sibuk mengelola potensi kemunduran daripada merancang lompatan bersama. Globalisasi tidak lagi diperlakukan sebagai arus alamiah, melainkan sebagai proses yang harus terus dinegosiasikan ulang.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Pidato para pemimpin dunia memperkuat kesan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi pusat dari setiap kebijakan ekonomi dan perdagangan. Ketika ia menyatakan bahwa tarif dan leverage akan tetap digunakan untuk melindungi kepentingan Amerika, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya sederhana. Dunia sedang bergerak menuju realisme yang lebih keras, di mana komitmen global tunduk pada kalkulasi politik domestik. Bagi sebagian peserta Davos, ini dianggap sebagai kejujuran politik. Namun bagi yang lain, pernyataan tersebut justru menandai melemahnya semangat multilateralisme yang selama ini menjadi jangkar stabilitas global.

Nada yang lebih teknokratik disampaikan oleh Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, yang mengatakan bahwa tatanan global tidak sedang runtuh, melainkan berubah. Pernyataan ini memberi kesan menenangkan, tetapi sekaligus menyimpan problem. Perubahan tanpa kerangka bersama menciptakan ruang abu abu kebijakan. Negara negara dipaksa menavigasi ketidakpastian dengan instrumen lama yang semakin kehilangan daya jelajah. Stabilitas dipertahankan, tetapi arah jangka panjang tetap kabur.

Isu kecerdasan buatan menjadi simbol paling kuat dari dilema global ini. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyebut bahwa kecerdasan buatan berpotensi menjadi gelombang besar yang menghantam pasar tenaga kerja. Ungkapan tersebut bukan sekadar metafora teknologi, melainkan peringatan kebijakan. Produktivitas memang berpotensi melonjak, tetapi jutaan pekerjaan juga berisiko tergeser, terutama di negara yang belum siap dengan sistem pendidikan dan perlindungan sosial yang adaptif. Ketika teknologi bergerak lebih cepat dari kebijakan, ketimpangan menjadi konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan.

Peringatan ini diperkuat oleh Yoshua Bengio, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam riset kecerdasan buatan, yang menyampaikan kekhawatiran bahwa dunia sedang memberikan kekuasaan besar kepada sistem yang belum sepenuhnya dipahami. Pesan yang tersirat jelas. Risiko terbesar bukan pada teknologinya, melainkan pada absennya tata kelola global yang memadai. Dialog tentang kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia memang mengemuka di Davos, tetapi pertanyaan politisnya masih menggantung. Siapa yang mengendalikan teknologi, dan siapa yang menanggung risikonya ketika terjadi kegagalan.

Dalam ranah ekonomi global, kegelisahan juga terasa. Larry Fink, CEO BlackRock, menyatakan bahwa kapitalisme global perlu memikirkan ulang bagaimana nilai diciptakan dan dibagikan. Pernyataan ini terdengar progresif, tetapi sekaligus mencerminkan kegelisahan elite ekonomi sendiri. Ketimpangan yang melebar, pertumbuhan yang melambat, dan fragmentasi geopolitik membuat narasi lama tentang efisiensi pasar kehilangan daya persuasinya. Kapitalisme masih bertahan, tetapi legitimasinya semakin sering dipertanyakan.

Yang paling terasa dari Davos 2026 adalah kesadaran bahwa era jawaban tunggal telah berakhir. Tidak ada model pembangunan yang bisa diterapkan seragam. Tidak ada resep global yang bebas risiko. Dunia bergerak menuju tatanan multipolar dengan preferensi kebijakan yang semakin beragam dan sering kali saling bertabrakan. Dalam kondisi seperti ini, kapasitas teknokratik dan kebijakan berbasis bukti justru menjadi semakin penting, meskipun godaan untuk menyederhanakan persoalan kompleks melalui retorika politik semakin kuat.

Bagi Indonesia, Davos 2026 membawa konsekuensi yang tidak kecil. Dunia tidak lagi menyediakan angin belakang yang kuat bagi pertumbuhan. Investasi global menjadi lebih selektif, perdagangan semakin terfragmentasi, dan teknologi berkembang lebih cepat daripada kapasitas regulasi. Dalam situasi ini, ketahanan domestik dan konsistensi kebijakan menjadi penentu utama.

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Davos perlu dibaca dalam konteks tersebut. Ketika ia menegaskan bahwa tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian dan stabilitas, pesan yang ingin disampaikan bukan sekadar diplomasi normatif. Ia menempatkan stabilitas sebagai prasyarat ekonomi, bukan sekadar tujuan politik. Penekanan pada disiplin fiskal dan pengendalian

inflasi juga menunjukkan kesadaran bahwa di tengah dunia yang semakin volatil, kehati-hatian makroekonomi tetap relevan.

Namun pidato tersebut juga mengandung konsekuensi kebijakan. Stabilitas tanpa akselerasi berisiko menjebak Indonesia pada pertumbuhan moderat yang terlalu nyaman. Di sinilah pelajaran dari empat temuan Davos 2026 menjadi relevan bagi Indonesia.

Pertama, kesepakatan global tidak lagi cukup. Indonesia tidak bisa hanya menunggu arus investasi, tetapi harus membangun daya tarik struktural melalui produktivitas, kepastian regulasi, dan kualitas institusi.

Kedua, momen perhitungan ulang global menuntut Indonesia untuk mengevaluasi strategi pembangunannya sendiri. Ketergantungan pada konsumsi domestik dan komoditas memberikan ketahanan jangka pendek, tetapi belum tentu cukup untuk menghadapi dunia yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.

Ketiga, dialog tetap penting, tetapi tidak bisa menggantikan kerja kebijakan di dalam negeri. Forum global membuka peluang, tetapi implementasi tetap ditentukan oleh kapasitas negara dalam mengeksekusi reformasi secara konsisten.

Keempat, banyaknya pertanyaan tanpa jawaban di Davos seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia bahwa waktu tidak berpihak pada mereka yang menunda. Ketidakpastian global justru menuntut kejelasan domestik. Negara yang mampu mengartikulasikan arah pembangunan secara konsisten akan lebih siap menghadapi guncangan eksternal.

Pada akhirnya, Davos 2026 bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara di panggung global, melainkan tentang siapa yang paling siap bekerja setelah forum berakhir. Dunia mungkin sedang kehilangan kepastian arah, tetapi negara yang membiarkan kebijakan domestiknya ikut kehilangan rasionalitas justru akan menanggung konsekuensi paling berat. Dalam situasi seperti ini, absennya pendekatan teknokratik bukan sekadar persoalan kurangnya keahlian atau data, melainkan kegagalan negara dalam mengubah kompleksitas global menjadi keputusan kebijakan yang terukur, konsisten, dan berjangka panjang. Tanpa kapasitas teknokratik yang kuat, stabilitas mudah berubah menjadi stagnasi, dan ambisi pembangunan hanya berhenti sebagai narasi.

Ironisnya, di tengah dunia yang dipenuhi pertanyaan besar, justru negara yang paling berisiko menjanjikan kepastian sering kali adalah negara yang paling tidak siap menjawabnya.